

## RENJA BAWASLU KOTA SURABAYA 2023

Sumber Dana	UKE (Unit Kerja)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
		115.CQ	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI</b>			
	PROVINSI & Kab/Kota	5245	<b>TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA</b>			
		5245.BAH	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>			<b>Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan</b>
		5245.BAH.001	<b>Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>			Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran		Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses		Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.		Laporan
Non Operasional Reguler	kab/kota		302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses		Laporan
		5245.BDB	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>			<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
	RPJMN	5245.BDB.001	<b>Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif</b>			Lembaga, Unit Kerja, Tim
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif		Daerah
		5245.BKC	<b>Pemantauan Lembaga</b>			<b>Laporan</b>
		5245.BKC.001	<b>Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu</b>			Laporan
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201 Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif		Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait		Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		203 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan		Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		204 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan		Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		205 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas		Laporan

Non Operasional Reguler	kab/kota		301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif		Laporan	
Non Operasional Reguler	kab/kota		302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait		Laporan	
Non Operasional Reguler	kab/kota		303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan		Laporan	
Non Operasional Reguler	kab/kota		304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan		Laporan	
Non Operasional Reguler	kab/kota		305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas		Laporan	
		6661	<b>PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN</b>					
		6661.QIC	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>					<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
		6661.QIC.001	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</b>				32	<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
			<b>Komponen Input :</b>					
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu		Dokumen	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)			Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran		Laporan	

Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa		Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan		Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)			Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu		Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan		Laporan
		6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			31	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301	Rekrutmen panwaslu kecamatan (Kab./Kota)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu		Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu		Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu		Daerah
		6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
		6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu				Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)			Unit
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)			Unit
		6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				
		6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu				Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				

Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses		Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu		Laporan
		6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC				
		6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc			185	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Honorarium (Kecamatan)			Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/Desa		501	Honorarium (Kelurahan/Desa)			Kelurahan/Desa
		6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc			185	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>				
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)			Lembaga
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)			Lembaga
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)			Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)			Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)			Daerah
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)			Orang
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/Desa		502	Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)			Orang
Tahapan Pemilu (PN)	TPS		602	Penanda Identitas (TPS)			Orang
		6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR				
		6839.QCE	Penanganan Perkara				Perkara, Berkas Perkara
		6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih				Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>				

Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara	
		6839.QIC	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>					<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
		6839.QIC.001	<b>Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih</b>					<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
			<b>Komponen Input :</b>					
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kelurahan/Desa		501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih		Laporan	
		6840	<b>PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU</b>					
		6840.QCE	<b>Penanganan Perkara</b>					<b>Perkara, Berkas Perkara</b>
		6840.QCE.001	<b>Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu</b>					<b>Perkara, Berkas Perkara</b>
			<b>Komponen Input :</b>					
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses		Perkara	

Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses		Perkara	
		6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga					Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu					Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>					
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		202	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu		Laporan	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu		Laporan	
		6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH					
		6841.QCE	Penanganan Perkara					Perkara, Berkas Perkara
		6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan					Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>					
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi		201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara	
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara	
		6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga					Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan					Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur

			<b>Komponen Input :</b>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi			Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi	202	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan			Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota	301	Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi			Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota	302	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan			Laporan
		6842	<b>PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA</b>				
		6842.QCE	<b>Penanganan Perkara</b>				<b>Perkara, Berkas Perkara</b>
		6842.QCE.001	<b>Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</b>				<b>Perkara, Berkas Perkara</b>
			<b>Komponen Input :</b>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan			Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran			Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi	203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses			Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan			Berkas Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran			Perkara
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota	303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses			Perkara
		6842.QIC	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>				<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
		6842.QIC.001	<b>Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</b>				<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
			<b>Komponen Input :</b>				
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi			Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi	202	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota			Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Provinsi	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses			Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi			Laporan

Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		302	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota		Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses		Laporan
Tahapan Pemilu (PN)	Kecamatan		401	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota		Laporan
		<b>115.WA</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>				
		<b>4355</b>	<b>PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL</b>				
		<b>4355.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>				<b>Dokumen, Layanan, Laporan</b>
		<b>4355.EBD.961</b>	<b>Layanan Reformasi Kinerja</b>				Dokumen, Layanan, Laporan
			<b>Komponen Input :</b>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan		Dokumen
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan		Dokumen
		<b>4356</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI</b>				
		<b>4356.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>				<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>
		<b>4356.EBA.958</b>	<b>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu</b>				Layanan, Laporan, Dokumen
			<b>Komponen Input :</b>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi		Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi		Laporan
		<b>4356.EBA.963</b>	<b>Layanan Data dan Informasi</b>				Layanan, Laporan, Dokumen
			<b>Komponen Input :</b>				
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia		Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID		Laporan
		<b>6849</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM</b>				
		<b>6849.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>				<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>

		6849.EBA.956	Layanan BMN			Layanan, Laporan, Dokumen
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	Laporan
		6849.EBA.994	Layanan Perkantoran			Layanan, Laporan, Dokumen
			<b>Komponen Input :</b>			
			001	Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	
Operasional Reguler	Provinsi		A)	Gaji dan tunjangan Bawaslu Provinsi		
Operasional Reguler	Kab/kota		B)	Gaji dan tunjangan Bawaslu Kabupaten/Kota		
			002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	
Operasional Reguler	Provinsi		A)	Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Provinsi		
Operasional Reguler	Kab/kota		B)	Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Kabupaten/Kota		
		6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			Unit, M2, Paket
		6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal			Unit, M2, Paket
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	Unit
Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit
Non Operasional Reguler	Provinsi		203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Unit
Non Operasional Reguler	Kab/kota		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Unit
		6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal			Unit, M2, Paket
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	Unit

Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit	
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit	
Non Operasional Reguler	Kab/kota		302	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit	
		6849.EBD	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>					<b>Dokumen, Layanan, Laporan</b>
		6849.EBD.952	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>					Dokumen, Layanan, Laporan
			<b>Komponen Input :</b>					
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran		Dokumen	
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran		Dokumen	
		6849.EBD.953	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>					Dokumen, Layanan, Laporan
			<b>Komponen Input :</b>					
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program		Dokumen	
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program		Dokumen	
		6849.EBD.955	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>					Dokumen, Layanan, Laporan
			<b>Komponen Input :</b>					
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan		Dokumen	
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan		Dokumen	
		6849.EBD.974	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu</b>					Dokumen, Layanan, Laporan
			<b>Komponen Input :</b>					
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan		Dokumen	
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan		Dokumen	
		6850	<b>PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM</b>					
		6850.EBA	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>					<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>

		6850.EBA.957	<b>Layanan Hukum</b>			Layanan, Laporan, Dokumen
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	Laporan
		6850.EBA.962	<b>Layanan Umum</b>			Layanan, Laporan, Dokumen
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		Laporan
		6850.EBA.969	<b>Layanan Bantuan Hukum</b>			Layanan, Laporan, Dokumen
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	Laporan
Non Operasional Reguler	Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	Laporan
		6850.EBC	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>			<b>Orang, Layanan</b>
		6850.EBC.954	<b>Layanan Manajemen SDM</b>			Orang, Layanan
			<b>Komponen Input :</b>			
Non Operasional Reguler	Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Provinsi	Jumlah aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	Orang
Non Operasional Reguler	Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	Orang